



Kotak Masuk

M

Monitoring Layan... 07.36
kepada saya ▾



Terjemahkan ke Indonesia



Notifikasi Monitoring SIASN

Hai Sobat BKN, Muhammad Rezza.

Terima kasih telah menggunakan monitoring layanan BKN.
Berikut adalah status usulan Layanan Penetapan NIP PPPK TEKNIS KHUSUS kamu:

Tahapan : Sdh di TTD - Pertek

Pertimbangan Teknis telah diterbitkan oleh BKN, saat ini
Keterangan : sedang menunggu proses pembuatan Surat Keputusan oleh
Instansi

Selamat beraktivitas dan sehat selalu. ☺

Kunjungi SIASN

Salam hangat, jabat erat.
Admin SIASN



Balas



99+



1854	1853	MUHAMMAD NOVREZA PAHLEVI	1987-11-02 SEKSI KERJASAMA - DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR / SUMATERA SELATAN
1855	1854	MUHAMMAD NUGRAHA	1993-11-08 SUBBAGIAN PROTOKOL DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH / SUMATERA SELATAN
1856	1855	MUHAMMAD NUR	1996-11-16 SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN / SUMATERA SELATAN
1857	1856	MUHAMMAD NURDIANSYAH	1991-07-17 SUBBAGIAN KEUANGAN - DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA / SUMATERA SELATAN
1858	1857	MUHAMMAD PARYANTO	1986-11-13 SEKSI BINA APARATUR PENCATATAN SIPIL - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL / SUMATERA SELATAN
1859	1858	MUHAMMAD PEBRI ROMADON	1995-02-16 SUBBAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN - DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERA / SUMATERA SELATAN
1860	1859	MUHAMMAD PETRA VIRGIAN	1985-09-17 / SUMATERA SELATAN
1861	1860	MUHAMMAD RAHMATTULLAH HADI SANTO	1985-11-14 SEKSI PEMELIHARAAN - DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR / SUMATERA SELATAN
1862	1861	MUHAMMAD RAJAB DARMAWAN	1997-11-21 SUBBAGIAN PENGELOLAAN INFORMASI PENGADAAN BARANG/JASA - BIRO PENGADAAN BARANG/JASA / SUMATERA SELATAN
1863	1862	MUHAMMAD RAJIB DARMADI	1997-11-21 SUBBAGIAN KEUANGAN - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL / SUMATERA SELATAN
1864	1863	MUHAMMAD RAMADHANNI	1988-02-09 SUBBIDANG SENGKETA PAJAK DAN DOLEANSI - BADAN PENDAPATAN DAERAH / SUMATERA SELATAN
1865	1864	MUHAMMAD RANDY AL FARISI	1996-07-11 SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM - DINAS SOSIAL / SUMATERA SELATAN
1866	1865	MUHAMMAD RASID	1984-05-10 SUBBAGIAN TATA USAHA PADA UPTB SCIENCE TECHNO PARK - BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN / SUMATERA SELATAN
1867	1866	MUHAMMAD RENALDO	1988-06-12 SUBBAGIAN PENDENDALIAN BMD - UPTD RSUD SITI FATIMAH / SUMATERA SELATAN
1868	1867	MUHAMMAD REZA UMARI	1997-02-13 SEKSI PENCEGAHAN DAN SARANA PRASARANA KEBAKARAN - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA / SUMATERA SELATAN
1869	1868	MUHAMMAD REZZA	2001-06-28 SUBBAGIAN TATA USAHA - BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL / SUMATERA SELATAN
1870	1869	MUHAMMAD RIDHO	1989-12-28 SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN - DINAS PERDAGANGAN / SUMATERA SELATAN
1871	1870	MUHAMMAD RINALDY	1997-09-16 SEKSI INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA / SUMATERA SELATAN
1872	1871	MUHAMMAD RIO FITRAH	1991-04-12 SEKSI KERJASAMA PERPUSTAKAAN - DINAS PERPUSTAKAAN / SUMATERA SELATAN
1873	1872	MUHAMMAD RIZAL	1989-10-02 SUBBAGIAN TATA USAHA PADA UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANIAN / SUMATERA SELATAN
1874	1873	MUHAMMAD RIZKI	1994-07-04 SUBBAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA / SUMATERA SELATAN
1875	1874	MUHAMMAD RIZKI ALFARIZ	1997-12-05 SEKSI PEMBANGUNAN DAN PRESERVASI JALAN WILAYAH I - DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGETAHUAN / SUMATERA SELATAN
1876	1875	MUHAMMAD RIZKI FADJAR	1992-02-10 SUBBAGIAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN PENGADAAN BARANG/JASA - BIRO PENGADAAN BARANG/JASA / SUMATERA SELATAN
1877	1876	MUHAMMAD RIZKI SAPUTRA	2000-06-10 SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN BELANJA - BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN / SUMATERA SELATAN
1878	1877	MUHAMMAD RIZKY ABDILLAH	2000-05-02 SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH / SUMATERA SELATAN
1879	1878	MUHAMMAD RIZQY PRASTYA	1995-12-13 SEKSI PENINGKATAN KREATIVITAS PEMUDA - DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA / SUMATERA SELATAN
1880	1879	MUHAMMAD ROBBI FEBRIAN	1990-02-14 SUBBAGIAN RUMAH TANGGA - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH / SUMATERA SELATAN



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
Nomor : 6449/KPTS/BKD.I/2025

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Menimbang : Bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Presiden No 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 329 Tahun 2024 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor HR-21600003046 tanggal 30 April 2025;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

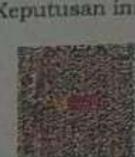
KESATU : Terhitung mulai 01 Mei 2025 sampai dengan 30 April 2030 mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama : MUHAMMAD REZZA
Nomor Induk PPPK : 200106282025211003
Tempat/Tanggal Lahir : KOTA PALEMBANG, 28 Juni 2001
Jenis Kelamin : Pria
Pendidikan : SMA MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM Tahun 2018
Jabatan : PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
Golongan : V
Gaji : Rp 2.511.500
Unit Kerja : SUBBAGIAN TATA USAHA – BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
Instansi : Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.



Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional VII BKN di Palembang;
3. Inspektor Daerah Prov. Sumsel di Palembang;

Keputusan ini disampaikan kepada:
Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
Kepala Kantor Regional VII BKN di Palembang;
Inspektor Daerah Prov. Sumsel di Palembang;
Kepala BKD Prov. Sumsel di Palembang;

Ditetapkan di: Palembang
pada tanggal : 30 April 2025
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

“ GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,